

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### A. Simpulan

1. Perencanaan berbasis multikultural di Fakultas Kependidikan Ilmu pendidikan (FKIP) Program Studi (Prodi) pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) UM Palangkaraya dilakukan dengan mengakomodir berbagai usulan dari bawah (*bottom up*) tanpa monopoli sepihak, tetapi dari Fakultas dan Program Studi (Prodi),
2. Pengorganisasian berbasis multikultural dilakukan rapat dan dialogis dengan membentuk panitia yang melibatkan wakil-wakil Ketua Prodi sebagai koordinator sesuai bidangnya. Semua koordinator bidang telah memahami visi, misi, dan tujuan FKIP UM Palangkaraya. Visi dan misi dipahami semua pimpinan Program Studi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Tim merancang program kegiatan yang searah dengan tercapainya visi Fakultas. Selain itu dalam pengorganisasian terdapat struktur organisasi yang jelas unit kerja masing-masing dilengkapi dengan Tupoksi (Tugas dan Fungsi) dan *Jobdescription (rincian kerja)* masing-masing jabatan/ manajemen, baik pada tingkatan *Top* manajemen, *Midle* manajemen dan maupun *Low* manajemen.
3. Pelaksanaan berbasis multikultural pada Program Studi PGSD mencakup penerimaan mahasiswa baru, penyusunan kelas, perekrutan tenaga Dosen Tidak Tetap (DTT) dan penyusunan tugas dosen dilakukan secara profesional tanpa mempermasalahkan latar belakang agama, suku dan

budaya. Peraturan dan kebijakan yang dibuat tidak diskriminasi. Seluruh mahasiswa mendapat pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianut dan oleh dosen yang seagama. Bagi mahasiswi non muslim tidak diwajibkan memakai hijab. Menyangkut perayaan hari besar agama/Ibadah yang dianut mahasiswa non Muslim, pihak UM Palangkaraya tidak membolehkan dilaksanakan di dalam kampus, namun memfasilitasi mahasiswa mengadakan di luar kampus dengan dikoordinir oleh Dosen/Pendeta yang bersangkutan. Selain itu, salah satu bentuk terlaksananya pendidikan berwawasan multikultural adalah mahasiswa dapat hidup berdampingan dengan damai dalam suasana akademik dan apabila ada mahasiswa yang sakit, terkena musibah, maka seluruh civitas akademik tanpa memandang latar belakang suku, agama dan budaya saling tolong menolong dan membantu. Bahkan mahasiswa diberikan pelayanan kesehatan secara gratis di rumah sakit PKU Muhammadiyah.

4. Pengawasan/kontrol berbasis multikultural pada Program Studi PGSD UM Palangkaraya meliputi; Dekan melakukan pengecekan rutin semua kegiatan yang berkaitan dengan Gugus kendali Mutu Fakultas, Manajemen KKN mahasiswa berkoordinasi dengan Ketua LP3M, Manajemen Praktek kerja Lapangan Mahasiswa berkoordinasi dengan Ketua UP3L atau instansi terkait lainnya. Mengkoordinasikan penyusunan buku panduan di tingkat Fakultas. Selanjutnya proses administrasi dengan memberikan masukan dan data pendukung kepada Rektor dalam menyusun laporan pencapaian kepada BPH UM Palangkaraya. Menerbitkan Surat keputusan mengajar

bagi setiap tenaga pendidik yang terdaftar di Fakultas, Menerbitkan surat keputusan mengenai nama-nama dosen yang berhak menjadi ketua sidang, pembimbing dan penguji tugas akhir (skripsi), Menerbitkan surat keputusan mengenai mahasiswa yang putus kuliah atau Droup Out (DO) atas usul dari prodi. Menyampaikan kemajuan belajar mahasiswa kepada orang tua.

Berdasarkan point-poin di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa di FKIP Program Studi PGSD UM Palangkaraya secara umum tidak ada mata kuliah maupun aturan serta kebijakan yang mendiskriminasi latar belakang mahasiswa yang berbeda agama suku dan budaya, namun mereka telah mengimplementasikan pendidikan yang berbasis multikultural. Hal tersebut tampak mulai dari bagian terkecil, misalnya proses perekrutan mahasiswa baru yang tanpa memandang suku agama dan budaya, pemberian materi pelajaran agama yang diajarkan oleh dosen yang seagama, adanya perekrutan Dosen Tidak Tetap yang non Muslim.

Toleransi keberagaman di FKIP Prodi PGSD UM Palangkaraya tampak harmonis. Hal tersebut terlihat dalam sikap melalui etika pergaulan, sopan santun, dialogis sehingga toleransi Mahasiswa dari berbagai latar belakang agama, suku, budaya serta dapat berdampingan dengan damai. Selain itu belum ada peraturan dan kebijakan kampus yang mendiskriminasi pemeluk agama tertentu, dan sama sekali tidak mempengaruhi penilaian akademis di mata kuliah. Semuanya diperlakukan secara adil tanpa melihat keimanan/keyakinan seseorang. Segala akses yang dimiliki oleh mahasiswa pemeluk agama muslim juga dapat dengan mudah dimiliki oleh mahasiswa pemeluk agama non

muslim. Kecuali dalam hal beribadah atau perayaan hari besar keagamaan yang dianut mahasiswa non muslim, masih belum diberikan akses/ijin di dilakukan dalam Kampus.

Pada ranah akademis, semua mahasiswa/i UM Palangkaraya diwajibkan mengambil mata kuliah Kemuhammadiyah. Namun materi-materi kuliah yang diberikan bersifat umum, tentang sejarah Kemuhammadiyah, sejarah agama Islam sehingga baik mahasiswa muslim maupun non muslim dapat mengenal dan mengetahui dengan baik, selain itu disampaikan oleh Dosen berkompeten dengan metode pembelajaran yang bervariasi, dialogis tanpa ada doktrinisasi dan diskriminasi terhadap pemeluk agama muslim dan non muslim, semua diperlakukan sama.

#### B. Saran-saran

1. Kepada Rektor UM Palangkaraya, Dekan Fakultas Kependidikan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan Ketua Program Studi (Prodi) PGSD untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan terus kualitas pengelolaan Fakultas Kependidikan dan Ilmu Kependidikan (FKIP) Program Studi (Prodi) PGSD sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta tingkatan manajemen masing-masing. Kiranya pula dapat memfasilitasi sarana di dalam kampus untuk beribadah bagi semua mahasiswa baik muslim maupun non muslim.
2. Kepada Dosen terus menanamkan, menambah wawasan dan meningkatkan proses serta meramu materi, desain pembelajaran, sumber, metode, dan metode pembelajaran berbasis multikultural kepada seluruh mahasiswa baik muslim dan non muslim dengan perlakuan yang sama.

3. Bagi staf FKIP/Prodi PGSD terus meningkatkan prestasi kerja terutama dalam pelayanan kepada mahasiswa yang berbasis multikultural.
4. Kepada masyarakat umum, jangan ragu untuk menuntut ilmu atau kuliahkan anak-anaknya di UM Palangkaraya, karena toleransi yang harmonis. Mahasiswa dapat hidup berdampingan dengan damai dengan latar belakang agama, suku dan budaya yang berbeda. Tidak ada diskriminasi akademis berdasarkan keyakinan atau keimanan seseorang dan doktrinisasi tertentu. Semua layanan pendidikan diberikan dengan adil. Selain itu keberagaman yang ada dipandang sebagai kekayaan/ khazanah komponen bangsa yang didayagunakan sebagai suatu potensi dan kekuatan dalam pembangunan masyarakat yang adil, berkarakter dan bermartabat.